

## **Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat**

**Susi Susanti**

Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

Email: [susisusanti61189@gmail.com](mailto:susisusanti61189@gmail.com)

### **Abstract**

*This research intends to find out the realization of the budget of the Aceh Barat Community Empowerment and Gampong Office. The research procedure used is using quantitative descriptive procedures. The type of data used is secondary data obtained from financial statements through documentation techniques. The analytical method used is a comparison ratio, namely the ratio of efficiency and effectiveness ratio. The results of the research prove that the level of effectiveness of the financial performance of the Aceh Barat Community and Gampong Empowerment Service in 2019 is said to be effective, in 2020 it is considered effective, and in 2021 it is said to be quite effective. Thus, the realization of the budget at the West Aceh Community Empowerment and Gampong Service can be said to have been right on target in accordance with the work program for the 2019-2021 period.*

**Keywords:** *Financial Report, Financial Performance, Effectiveness Ratio*

### **Abstrak**

Riset ini bermaksud untuk mengetahui realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat. Tata cara riset yang dipakai ialah menggunakan tata cara deskriptif kuantitatif. Tipe data yang dipakai merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan melalui teknik dokumentasi. Metode analisis yang dipakai adalah rasio perbandingan yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil riset membuktikan tingkatan efektivitas kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat pada tahun 2019 dikatakan efektif, pada tahun 2020 termasuk efektif, dan pada tahun 2021 dikatakan cukup efektif. Dengan demikian, realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat dapat dikatakan telah tepat sasaran sesuai dengan program kerja pada periode 2019-2021.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut (Sijabat, 2014). Anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah merupakan perencanaan keuangan yang di susun oleh eksekutif dan di setujui oleh legeslatif, serta program. Anggaran memberikan informasi tentang pendapatan dan belanja ini terkait dengan anggaran penerimaan dan pengeluaran serta program yang akan di lakukan pada periode (Hidayat, 2022). Laporan Realisasi Anggaran yaitu yang menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal evesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Umar, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap instansi harus dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan anggaran sesuai prosedur dengan baik dan benar, termasuk juga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong karena hal ini menjadi tolak ukur anggaran dapat digunakan secara efisien dan efektif, selaras dengan program dan sasaran penyusunan anggaran yang telah ditetapkan. Dan mampu menata penyusunan anggaran di pemerintahan Kabupaten Aceh Barat ke aspek transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan sasaran yang jelas untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Sijabat, 2014). Rasio keuangan ini merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Sebagai sarana evaluasi kinerja, laporan keuangan pemerintah berguna untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan dan dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya (Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. 2019).

Laporan keuangan yaitu ikhtisar atas kondisi suatu lembaga, dimana neraca yang memantulkan angka aktiva, pinjaman dan modal sendiri serta laporan laba rugi dan keuntungan menggambarkan atas hasil yang sukses dicapai sepanjang rentang waktu tertentu. Laporan keuangan disusun guna memperoleh cerminan atas perkembangan dari peliputan keuangan dengan cara periodik dalam lembaga. Pencatatan yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penyusunan laporan keuangan, hal ini diwajibkan sesuai dengan prinsip akuntansi wajib. Sifat laporan keuangan adalah historis dan komprehensif, (Yuniansyah, 2018). Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong harus dapat mengatur pengelolaan keuangannya dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Termasuk kesiapannya dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Untuk melihat kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat dalam merealisasikan anggaran yang dikelola dapat dilihat melalui laporan realisasi anggaran berikut ini:

Tabel 1. Ringkasan Jumlah Anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat

Tahun	Kelompok	Jumlah
2019	Belanja Langsung	Rp 3.579.368.075,00
2020	Belanja Langsung	Rp 2.275.646.108,00
2021	Belanja Langsung	Rp 4.383.322.270,75

Sumber : Data Olahan DPMG Aceh Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 1 jumlah anggaran Tahun 2019 yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat sebesar Rp 3.579.368.075,00 dengan 7 program kerja. Akan tetapi, pada tahun 2020 jumlah anggaran yang dikelola menjadi Rp 2.275.646.108,00 dengan jumlah penurunan sebesar Rp 1.303.721.976,00. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya guncangan pandemi Covid-19 tahun 2020. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan program kerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat menjadi 6 program yang akan direalisasikan pada tahun 2020. Namun, anggaran yang dikelola kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp

4.383.322.270,75. Dapat dilihat bahwa kenyataannya anggaran yang telah ditetapkan pada tiap tahunnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh barat tidak semua terserap sepenuhnya. Masih terdapat permasalahan serta kekurangan seputaran anggaran diantaranya dilihat dari realisasi anggaran belanja yang masih belum mencapai 100% pada tiap tahunnya.

Peningkatan dan penurunan nominal anggaran yang dikelola oleh DPMG Kabupaten Aceh Barat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, adanya hal tersebut mengakibatkan terjadinya gap sehingga diperlukan analisis yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang direalisasikan dari APBD yang digunakan untuk memenuhi belanja langsung dan tidak langsung dengan menggunakan rasio efektivitas.

Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung. Dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah melalui pemaparan kebijakan SKPD, menggunakan sumberdaya yang telah disediakan guna mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan SKPD tersebut, (Wikipedia bahasa Indonesia, 2021). Sebaliknya belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terpaut dengan cara langsung dengan penerapan program. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

### **Kajian Pustaka**

#### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengharuskan departemen pemerintah memenuhi kualitas pelaporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Dua kriteria utamanya, sejalan dengan persyaratan peraturan tersebut. Kriteria pertama adalah relevansi. Relevansi adalah data yang dihasilkan dari laporan keuangan yang dicatat secara berkala dalam jangka waktu tertentu dan hal tersebut sesuai dengan informasi pelaporan keuangan dengan manfaat umpan balik yang digunakan untuk mengambil keputusan, dan tujuan apa yang akan dilakukan agensi. Yang kedua adalah tentang keandalan. Data yang dapat dipercaya adalah data yang jujur, dapat diverifikasi, netral dalam representasi atau tidak mendukung kepentingan pihak pemerintah tertentu.

Laporan keuangan yaitu ikhtisar atas kondisi suatu lembaga, dimana neraca yang memantulkan angka aktiva, pinjaman dan modal sendiri serta laporan laba rugi dan keuntungan menggambarkan atas hasil yang sukses digapai sepanjang rentang waktu tertentu. Laporan keuangan disusun guna memperoleh cerminan atas perkembangan dari peliputan keuangan dengan cara periodik dalam lembaga. Pencatatan yang sudah Dilakukan sebagai bagian dari penyusunan laporan keuangan, hal ini diwajibkan sesuai dengan prinsip akuntansi wajib. Sifat laporan keuangan adalah historis dan komprehensif, (Yuniansyah, 2018).

#### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan adalah prestasi yang berhasil dicapai oleh suatu organisasi dalam rentang waktu kesehatan organisasi. Kinerja keuangan merupakan cerminan hasil yang digapai dalam aktivitas operasionalnya menyangkut pandangan finansial, pandangan penjualan, pandangan agregasi anggaran serta distribusi anggaran, pandangan teknologi, maupun pandangan sumber daya manusianya, (Basri, 2013).

#### **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah wilayah selaku pihak yang diberikan kebijakan pembangunan dan layanan sipil harus menyediakan akuntansi keuangan untuk sumber energi yang dikumpulkan oleh penduduk. Hal ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan warga. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, (Kurrohman, 2013).

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah, salah satunya dengan menggunakan rasio kinerja keuangan. Beberapa rasio yang tersedia adalah: tingkat efektif, tingkat efisiensi keuangan daerah, tingkat keselarasan, tingkat pembangunan, tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun berdasarkan data yang ada, untuk menilai kinerja keuangan dalam penelitian ini, maka digunakan Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas, (Assidi, 2008).

### Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input atau dengan istilah lain output per unit input, (Roland, 2016).

### Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan, (Roland, 2016).

## 2. METODE PENELITIAN

### Lokasi dan waktu penelitian

Riset dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat, Jalan Drien Rampak, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari kasubag keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat berupa data time series yaitu laporan keuangan periode 2019–2021 dan laporan realisasi kinerja periode 2018–2021 dengan teknik dokumentasi.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2019–2021 yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat melalui teknik dokumentasi. Sampel yang digunakan adalah seluruh realisasi anggaran pada laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat Tahun 2019-2021.

### Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah metode kuantitatif dengan metode analisa rasio perbandingan, yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Rasio Efisiensi dapat di hitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas membuktikan kemampuan pemerintah wilayah dalam aktivitas mengatur pendapatan sesuai dengan ketentuan serta sasaran yang telah diseujui. Rasio efektivitas dihitung dengan cara menyamakan realisasi penerimaan PAD dengan sasaran pendapatan ataupun yang sudah dianggarkan. Berikut rumus Rasio Efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian pengelolaan keuangan daerah berdasarkan rasio efektifitas juga dapat dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : (Susanto, 2019)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

#### Analisis Data

Adapun realisasi anggaran keuangan pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	435.397,388	367,720,990	82.16%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	110,864,271	81,223,026	73.26%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	294,268,500	278,057,620	94.49%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1,091,387,000	1,060,501,363	97.17%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	298,194,740	286,908,830	96.22%
Program Peningkatan Kerjasama Masyarakat Dalam Membangun Desa	140,435,500	140,435,500	100.00%
Program Peningkatan Dan Pelayanan Pemerintahan Mukim	1,208,818,676	1,198,460,780	99.14%
Total Belanja Langsung	3,579,365,975	3,403,308,109	95.08%

Sumber : Data Olahan DMPG Aceh Barat, 2022

Dari Tabel 3 di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Gampong Aceh Barat mempunyai 7 program kegiatan untuk satu rentang waktu dan telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan konsep perhitungan yang telah diresmikan untuk setiap program. Secara keseluruhan perhitungan belanja langsung sebanyak Rp 3.579.365.975 serta terealisasi sebesar Rp 3.403.308.109. dengan perhitungan belanja tidak melebihi perhitungan yang telah disepakati.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi dan Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 3.403.308.109}{\text{Rp } 3.579.365.975} \times 100\% = 95,08\%$$

Tabel 4 Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	281,166,548	265,907,659	94.57%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	146,131,000	145,506,747	99.57%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	11,802,500	11,802,500	100.00%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	681,374,800	680,879,072	99.93%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	112,506,300	112,461,300	99.96%
Program Peningkatan Dan Pelayanan Pemerintahan Mukim	1,042,664,960	1,015,123,040	97.36%
Belanja Langsung	2,275,646,108	2,231,680,318	98.07%

Sumber : Data Olahan DMPG Aceh Barat, 2022

Dari Tabel 4 di atas terlihat jelas bahwa pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat mempunyai 6 program kegiatan untuk satu rentang waktu dan telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan konsep anggaran yang telah direncanakan untuk setiap program. Secara keseluruhan, anggaran belanja langsung sebanyak Rp 2,275,646,108 terealisasi sebesar Rp 2,231,680,318. Dimana, dalam mewujudkan anggaran belanja itu tidak melampaui perhitungan yang sudah ditetapkan.

Untuk melihat efisiensi dan efektivitas anggaran dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi dan efektivitas} = \frac{\text{Rp } 2.231.680.318}{\text{Rp } 2.275.646.108} \times 100\% = 98,07\%$$

Tabel 5 Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,402,029,217.00	3,198,229,686.00	94.01%
Program Administrasi Pemerintah Daerah	556,502,468.00	252,589,530.00	45.39%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	424,790,585.75	410,603,305.00	96.66%
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>4,383,322,270.75</b>	<b>3,861,422,521.00</b>	<b>88.09%</b>

Sumber : Data Olahan DMPG Aceh Barat, 2022

Dari Tabel 5 diatas bisa diamati jika di tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Gampong Aceh Barat mempunyai 3 program kegiatan untuk satu rentang waktu dan sudah melakukan program itu sesuai dengan konsep anggaran yang sudah diresmikan untuk setiap program. Dengan cara totalitas keseluruhan anggaran belanja langsung sebanyak Rp 4,383,322,270,75 serta terealisasi sebesar Rp 3,861,422,521.00 dimana dalam mewujudkan perhitungan belanja itu tidak melampaui anggaran yang sudah ditetapkan.

Untuk melihat efisiensi dan efektivitas anggaran dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi dan Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 3.861.422.521,00}{\text{Rp } 4.383.322.270,75} \times 100\% = 88.09\%$$

Bersumber pada kriteria evaluasi Rasio Daya guna Anggaran, selanjutnya merupakan ringkasan hasil kalkulasi tingkatan daya guna anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Gampong Aceh Barat dari tahun 2019- 2021, bisa diamati pada tabel berikut:

Tabel. 6 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	2019	3,579,365,975.00	3,403,308,109.00	95.08%	Efisien dan fektif
2	2020	2,275,646,108.00	2,231,680,318.00	98.07%	Efisien dan efektif
3	2021	4,383,322,270.75	3,861,422,521.00	88.09%	Cukup Efektif

Sumber : Data Olahan DMPG Aceh Barat, 2022

### Pembahasan

Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Gampong Aceh Barat mempunyai 7 program kegiatan untuk satu rentang waktu dan telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan konsep perhitungan yang telah diresmikan untuk setiap program, penerapan perhitungan belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Gampong Aceh Barat membuktikan

perbandingan dengan tingkatan daya guna sebesar 95.08% yang maksudnya penerapan anggaran belanja tersebut telah efisien dan efektif. Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat mempunyai 6 program kegiatan untuk satu rentang waktu dan telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan konsep anggaran yang telah direncanakan untuk setiap program. Sedangkan tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Gampong Aceh Barat mempunyai 3 program kegiatan untuk satu rentang waktu dan sudah melakukan program itu sesuai dengan konsep anggaran yang sudah diresmikan untuk setiap program, pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat membuktikan rasio dengan tingkatan daya guna sebesar 88.09% yang maksudnya penerapan anggaran belanja itu tercantum dalam kriteria cukup efisien dan efektif.

Tingkatan efektifitas paling tinggi terjadi pada tahun 2020. Sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2021. Anggaran belanja dapat dikatakan efisien dengan melihat kinerja tahun 2019 dan 2020. Namun pada tahun 2021, tingkatan daya guna kembali menyusut karena realisasi anggaran belanja memiliki perbandingan yang terbilang jauh dari sasaran yang wajib dicapai. Dari data- data tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan berhasil dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah direncanakan melalui program kegiatan pada rentang waktu 2019- 2021.

#### 4. KESIMPULAN

Bersumber pada hasil riset serta ulasan kepada fokus riset ini, hingga dapat ditarik kesimpulan, hasil kalkulasi tingkatan daya guna anggaran belanja bisa diamati jika sepanjang rentang waktu anggaran tahun 2019- 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Gampong, pada tahun 2019 tingkatan daya gunanya ialah pada persentase 95.08% dengan kriteria efisien. Pada tahun 2020 hadapi ekskalasi sebesar 2.99% dan persentasenya menjadi 98.07% dengan kriteria efektif. Setelah itu pada tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 9.98% sehingga persentasenya menjadi 88.09% dengan kriteria cukup efektif.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kriteria tingkat efektifitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat berada dalam kriteria efektif. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang sangat besar pada angka tingkat efektivitas sehingga efektivitasnya berada pada kriteria cukup efektif. Realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat dapat dikatakan telah tepat sasaran sesuai dengan program kerja pada periode 2019-2021. Tingkat efikasi menurun untuk periode 2020 dan meningkat pada periode 2021. Tingkat Efektivitas pada tahun 2019 adalah sebesar 95.08% dengan kriteria Efisien dan efektif. Pada tahun 2020 sebesar 98.07% dengan kriteria Efisien dan efektif. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 88.09% dengan kriteria Cukup Efektif.

#### REFERENCES

- [1] Assidi, B. (2008). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun. c, 1–11.
- [2] Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- [3] Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Diakses pada tanggal 27 November 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>
- [4] Hidayat, M. T. (2022). Muhammad Taufiq Hidayat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 27(1), 52–62.
- [5] Kurrohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1–11.
- [6] Roland Gerald Tooy, David Paul Elia Saerang, L. M. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 659–671.

- [7] Sijabat, M. Y. (2014). ... Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah .... Jurnal Administrasi Publik, 2(32), 236–242. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/365>
- [8] Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- [9] Umar, Z. (2016). Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014. *Jurnal Ilman*, 4(1), 18–32.
- [10] Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2021). Belanja langsung. [Id.Wikipedia.Org](https://id.wikipedia.org). Diakses pada tanggal 07 November 2022.
- [11] Yuniansyah, O. (2018). Pengaruh Profitabilitas Dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2012-2016). *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 5–24.